

PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2022

PERDA KOTA MADIUN NO.2,LD 2022 / NO. 1 SERI A ,616 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; g. Catatan atas Laporan Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Praturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemrintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemrintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 206 / PMK.07/ 2020; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2017;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 20013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Ekonomi Makro Dan Kebijakan Keuangan APBD, Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, Kebijakan Akuntansi, Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran, Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan SAL, Penjelasan Pos-Pos Neraca, Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional, Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas, Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Informasi Nom Keuangan, Lampiran.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Juli 2022